

RENCANA STRATEGIS

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

2020-2024



REVIU

**RENCANA STRATEGIS
DEPUTI BIDANG METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK
2020-2024**

No. Publikasi : 02110.1200
Katalog BPS : 1201010
Ukuran Buku : 17 cm x 24 cm
Jumlah Halaman : ix + 62 halaman

Naskah :

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

Gambar Kulit :

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

Diterbitkan oleh :

Badan Pusat Statistik - Indonesia

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

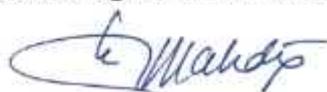
KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik (MIS) BPS Tahun 2020–2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputy Bidang MIS yang merupakan penjabaran dari tujuan, visi, dan misi Renstra BPS Tahun 2020–2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020–2024. Renstra Deputy Bidang MIS diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di bidang statistik, khususnya dari aspek Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, Diseminasi Statistik, dan Sistem Informasi Statistik.

Renstra Deputy Bidang MIS ini disusun berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, dan hasil analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis yang terjadi di BPS serta agenda Reformasi Birokrasi melalui *Statistical Capacity Building-Change and Reform for the Development of Statistics* (STATCAP-Cerdas).

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas masukan dan partisipasi aktifnya dalam proses penyusunan Renstra ini. Semoga Tuhan Yang Maha Pemurah memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat bersama-sama mewujudkan Visi Deputy Bidang MIS, yaitu **“Penyedia Metodologi dan Informasi Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju”**.

Jakarta, 11 Januari 2022
Deputy Bidang
Metodologi dan Informasi Statistik,



Dr. Eng. Imam Machdi M.T.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tuntutan pengguna data dewasa ini terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang semakin beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data menginginkan data bisa tersedia lebih cepat, lebih murah, lebih mudah diperoleh, dan lebih berkualitas. Aspek kualitas tidak hanya dituntut dari sisi datanya saja tetapi juga dari aspek pelayanan yang harus dipenuhi sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini, peran penyebarluasan statistik menjadi penting untuk dijadikan sebagai garda terdepan dalam melayani masyarakat.

Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi (KISS) senantiasa dilakukan oleh BPS selaku inisiator bersama dengan seluruh penyelenggara kegiatan statistik baik segenap instansi pemerintah dan atau unsur masyarakat untuk memperkuat Sistem Statistik Nasional (SSN), salah satunya adalah dalam menetapkan penyebarluasan dan pemanfaatan hasil statistik. Penyediaan informasi statistik kepada konsumen sesuai dengan kebutuhannya diharapkan dapat memberikan umpan balik keluaran yang perlu disempurnakan untuk penyelenggaraan berikutnya serta untuk memantapkan SSN.

Untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang berkualitas maka penyelenggaraan kegiatan statistik dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah statistik. Pengembangan metodologi sensus dan survei senantiasa dilakukan dan disebarluaskan penggunaannya kepada produsen data sebagai dukungan untuk menghasilkan data sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (SDI). Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) yang bertindak sebagai penyelenggara kegiatan statistik sektoral masih perlu diberikan asistensi dalam penyelenggaraan kegiatan statistiknya hingga kemandirian K/L/D/I dapat terwujud. Salah satu bentuk asistensi yang dilakukan BPS adalah melalui pemberian rekomendasi untuk kegiatan statistik sektoral yang akan diselenggarakannya. Hal ini merupakan

amanah dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang menyatakan bahwa BPS bertindak sebagai pembina data statistik yang memiliki tugas diantaranya adalah menetapkan struktur baku dan format baku metadata yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik mempunyai fungsi dan tugas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, pengendalian terhadap kebijakan teknis, dan pelaksanaan pengembangan metodologi sensus dan survei, diseminasi statistik, dan sistem informasi statistik serta pelaksanaan tugas lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BPS. Tanggung jawab yang diberikan ini merupakan penegasan terhadap semangat reformasi yang menginginkan dilakukannya pembaharuan dan peningkatan efektivitas dalam melaksanakan fungsinya. Hal tersebut merupakan tuntutan pemerintah terhadap setiap kementerian/lembaga agar memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan transparan sebagai bentuk mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun 2020-2024 menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan statistik khususnya pada bidang metodologi sensus dan survei, sistem informasi statistik, dan diseminasi statistik.

Visi Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik adalah “Penyedia Metodologi dan Informasi Statistik Berkualitas untuk Mendukung Indonesia Maju” untuk mendukung visi BPS “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”. Selanjutnya, penjabaran misi yang menerjemahkan visi tersebut di atas mencakup:

- 1) Mengembangkan metodologi survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas, baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka

sampel, standar data dan klasifikasi statistik serta pemetaan wilayah kerja statistik untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) dan Satu Data Indonesia (SDI)

- 2) Membina K/L/D/I untuk metodologi dan pelaksanaan kegiatan statistik
- 3) Meningkatkan layanan statistik dan layanan TI untuk mendukung Sistem Statistik Nasional

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum.....	2
1.1.1. Pencapaian Umum Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun 2015-2019	2
1.1.2. Inovasi dan Prestasi Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun 2015-2019.....	11
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	22
1.2.1. Potensi yang dimiliki.....	22
1.2.2. Permasalahan yang dihadapi	24
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN DEPUTI BIDANG METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK	28
2.1. Visi Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik.....	28
2.2. Misi Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik.....	29
2.3. Tujuan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik.....	30
2.4. Sasaran Strategis Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik.....	31
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	33

3.1.	Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik	33
3.2.	Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	34
3.3.	Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Diseminasi Statistik	36
3.4.	Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Sistem Informasi Statistik	36
3.5.	Program dan Kegiatan	39
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	46
4.1.	Target Kinerja	46
4.2.	Kerangka Pendanaan	48
BAB V	PENUTUP	51
LAMPIRANError! Bookmark not defined.	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persentase Capaian Kinerja berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik 2015-2019.....	4
Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik 2020–2024.....	31
Tabel 3 Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, 2020-2024.....	46
Tabel 4. Indikasi Kebutuhan Pendanaan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, 2020–2024.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik 2020-2024	54
--	----

BAB I



BAB I

PENDAHULUAN

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik (MIS) dan unit kerja di bawahnya meliputi pengembangan dan penyediaan metodologi yang andal dan tepat sasaran, penyelenggaraan kegiatan pengelolaan rujukan statistik, publikasi dan kompilasi statistik, layanan dan promosi statistik, dan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi statistik serta penyediaan dan pengelolaan sistem informasi statistik sehingga terlaksananya integrasi dan pengolahan data yang maksimal dengan dukungan jaringan komunikasi baik data maupun informasi lainnya. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistemik akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta mendukung layanan yang diberikan oleh Deputi Bidang MIS. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan harus dilandasi oleh suatu kebijakan, strategi, dan program yang komprehensif dan terpadu yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Renstra instansi pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang yaitu entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, unit organisasi, dan Kementerian/Lembaga. Sedangkan penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, serta rewiu dan evaluasi kinerja. Selanjutnya Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengatur bahwa penyusunan rencana strategis

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

Renstra Deputy Bidang MIS Tahun 2020-2024 berisi visi, misi, dan tujuan yang diselaraskan dengan visi, misi, dan tujuan Badan Pusat Statistik (BPS) 2020-2024, serta berisi arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan kerangka pendanaan selama lima tahun. Dengan adanya Renstra sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkungan Deputy MIS akan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Pencapaian Umum Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun 2015-2019

Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik (MIS) merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). Deputy Bidang MIS mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik.

Deputy Bidang MIS menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, pengendalian terhadap kebijakan teknis, dan pelaksanaan pengembangan metodologi sensus dan survei, diseminasi statistik, dan sistem informasi statistik serta pelaksanaan tugas lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

BPS selaku instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan transparan dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*. Dalam mendukung tercapainya data statistik yang akurat, terpercaya dan berkualitas, maka menjadi tanggung jawab BPS untuk

melakukan langkah – langkah dalam penyusunan suatu sensus/survei, diseminasi dan pengelolaan sistem informasi statistik. BPS juga memiliki tantangan untuk dapat menjalankan amanah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna serta dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana sehingga peran diseminasi (penyebarluasan) statistik menjadi penting untuk dijadikan sebagai garda terdepan dalam melayani masyarakat. Aspek kualitas tidak hanya dituntut dari sisi datanya saja tetapi juga dari aspek pelayanan yang harus dipenuhi sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat.

Peran BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik seperti yang diamanatkan dalam Undang Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik, membawa konsekuensi berupa tuntutan akan ketersediaan sistem informasi yang memudahkan pengguna data statistik untuk memperoleh informasi secara cepat, akurat dan andal. Upaya penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut dari sistem tersebut perlu tetap dilanjutkan mengingat kemajuan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, yang disertai dengan meningkatnya volume pekerjaan, bentuk dan variasi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna data.

Di sisi lain, ketersediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mampu mendukung beban kerja pengumpulan data, pengolahan data, dan diseminasi informasi statistik yang semakin meningkat mutlak diperlukan. Untuk itu, BPS telah mengantisipasi hal tersebut dengan membangun infrastruktur TIK, di pusat maupun daerah, secara terus menerus dengan mempertimbangan berbagai aspek teknis dan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas. Kinerja BPS dalam melaksanakan kegiatannya diukur melalui pencapaian kinerja indikator-indikator sasaran.

Capaian kinerja Deputy Bidang MIS Tahun 2015-2019 merupakan pencapaian dari indikator-indikator kinerja sasaran selama periode Renstra Deputy Bidang MIS 2015-2019. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara

realisasi dengan target indikator kinerja pada masing-masing sasaran. Indikator kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan targetnya pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) pada tahun yang bersangkutan. Hasil capaian kinerja Deputi MIS Tahun 2015 – 2019 tertuang pada tabel berikut:

Tabel 1. Persentase Capaian Kinerja berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik 2015-2019

Sasaran Kegiatan/indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya dukungan metodologi sensus dan survei yang tepat guna					
Jumlah dokumen desain sensus dan survei yang mutakhir	100	100	100	100	111,1
Jumlah publikasi standarisasi dan klasifikasi statistik yang terbit tepat waktu	100	100	100	100	100
Jumlah dokumen pengembangan kerangka sampel survei yang mutakhir	100	100	100	117	115,2
Persentase data SBR yang <i>ter-update</i>	100	100	100	262,4	99,38
Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	104	100	100	100	100
Jumlah sistem aplikasi pengembangan metodologi sensus dan survei yang dikembangkan dan dipelihara	100	100	100	100	100
Jumlah laporan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir	100	100	100	100	100
Jumlah peta desa dan blok sensus yang <i>di-update</i>	87,17	89,91	118,6	100	-

Sasaran Kegiatan/indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah peta wilayah kerja statistik SP2020 yang mutakhir (desa/kelurahan)	-	-	-	-	100,5
Jumlah <i>geotagging</i> infrastruktur desa	-	-	-	-	100
Jumlah peta wilayah kerja statistik SP2020 yang mutakhir (satuan lingkungan setempat)	-	-	-	-	109,4
Jumlah permintaan layanan konsultasi klasifikasi oleh kementerian/lembaga/institusi/perorangan	-	-	120	168	105
Peningkatan kualitas hubungan dengan pengguna data					
Jumlah sistem pendukung layanan untuk diseminasi data dan informasi statistik yang dikembangkan dan atau dipelihara	100	100	120	120	100
Jumlah publikasi yang terbit tepat waktu	100	100	105,9	120	120
Jumlah publikasi/laporan statistik yang memiliki ISSN/ISBN	100	100	105,9	117,7	94,12
Jumlah pemenuhan layanan permintaan ISSN dan ISBN	198,3	220,6	120	120	120
Jumlah aktivitas layanan langsung terhadap konsumen	109	69	95,99	94,22	74,38
Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS	108,4	112,3	106	110,5	114,5
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i>	91,6	127	120	120	120

Sasaran Kegiatan/indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah satker yang memiliki website terhubung secara online	-	100	107	100	100
Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN					
Jumlah metadata kegiatan statistik dasar yang dihimpun	142	138	120	120	120
Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	95,6	152	120	120	120
Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang masuk dalam Sirusa	103,3	149,7	120	120	120
Jumlah dokumen SKD yang dihimpun	112,2	107,2	119,9	120	106,3
Jumlah instansi/institusi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	-	-	4,35	120	120
Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi	-	-	17,86	120	120
Terlaksananya integrasi dan pengolahan data dengan dukungan jaringan komunikasi yang andal					
Jumlah sistem informasi/aplikasi pengolahan yang dibuat/dikembangkan/ dipelihara	120	166	169,3	144	120
Jumlah permintaan Penyusunan Sistem Informasi/aplikasi pengolahan yang ditindaklanjuti	NA	125	100	100	120
Jumlah buku pedoman yang disusun/disempurnakan pengolahan yang disusun atau disempurnakan	NA	112,5	100	100	113

Sasaran Kegiatan/indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase peserta pelatihan pengolahan yang layak bertugas	NA	100	100	100	100
Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS pusat tepat waktu	100	100	100	100	100
Jumlah kajian dan perancangan sistem dan aplikasi infrastruktur statistik	NA	100	-	100	100
Terciptanya sistem layanan diseminasi statistik yang berkualitas dan prima					
Jumlah penambahan koleksi data yang dihimpun	120	100	90	42,5	120
Jumlah penambahan koleksi data dalam sistem katalog mikrodata	NA	100	46,66	35	12,33
Jumlah usulan RKA	NA	100	100	100	100
Terlaksananya kegiatan operasional statistik dengan dukungan layanan TI yang andal					
Persentase <i>uptime</i> layanan jaringan komunikasi	100	100	100	100	100
Persentase permintaan akses data yang ditindaklanjuti	NA	100	100	100	100
Persentase permintaan <i>video conference</i> yang ditindaklanjuti	NA	100	100	100	100
Persentase permintaan alokasi <i>storage</i> yang ditindaklanjuti	NA	83,75	117,5	117,5	100
Layanan sistem informasi statistik	NA	100	100	100	N/A
Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	120	N/A	100	100	62,5
Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang diselesaikan	100	N/A	100	100	62,5

Sasaran Kegiatan/indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah dokumen pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	NA	N/A	N/A	N/A	62,5
Jumlah dokumen Transformasi TI yang terbit tepat waktu	85,71	N/A	N/A	N/A	62,5
Jumlah laporan implementasi EA	NA	100	350	100	100
Jumlah dokumen SOP yang dikembangkan	NA	N/A	100	100	100
Jumlah laporan perancangan <i>data management</i>	NA	N/A	72,3	100	100
Persentase pengembangan TIK BPS untuk integrasi statistik dari hulu ke hilir	0	N/A	N/A	20	20
Persentase penyelesaian penyusunan strategi dan perancangan TIK	NA	100	N/A	100	100
Jumlah kajian terkait teknologi baru terkait transformasi sistem informasi statistik dan manajemen	NA	100	N/A	100	100
Persentase perbaikan sarana TI yang sesuai dengan <i>service level agreement</i>	100	100	100	100	100

Rata-rata capaian kinerja Deputi Bidang MIS di tahun 2019 terhadap Renstra 2015-2019 mencapai 100% atau lebih. Secara umum, kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS) menunjukkan keberhasilan, yaitu rata-rata pencapaian sasaran sebesar 102,46 persen selama Tahun 2019. Sedangkan kinerja Direktorat Diseminasi Statistik (DDS) juga menunjukkan keberhasilan, yaitu rata-rata pencapaian sasaran sebesar 110,1 persen. Sementara itu, rata-rata pencapaian sasaran kinerja Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS) adalah sebesar 99,04 persen.

Capaian kinerja untuk tujuan peningkatan metodologi sensus dan survei dengan sasaran tersedianya dukungan metodologi sensus dan survei yang tepat guna sudah melebihi target. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS target dan realisasi sudah sesuai dan mencapai 100% baik pada tahun 2018 maupun tahun 2019. Indikator kinerja jumlah peta desa dan blok sensus yang *ter-update* pada Renstra 2015-2019, di tahun 2019 sejumlah 935.000. Pada dasarnya, kegiatan Pemetaan di tahun 2019, peta wilkerstat tidak hanya sejumlah 935.000 desa dan blok sensus, namun seluruh desa dan SLS/non SLS di Indonesia sehingga pencapaiannya melebihi 100% di tahun 2019. Dalam pengerjaan peta wilkerstat SLS/non SLS digunakan peta blok sensus sebagai peta dasar untuk menentukan batas SLS/non SLS dan juga dilengkapi dengan informasi ketua SLS.

Indikator kinerja jumlah desa dan blok sensus yang *di-update* dijabarkan secara rinci pada indikator kinerja Subdirektorat Pengembangan Pemetaan Statistik. Pada indikator ke-8 bertarget 0 dan diganti dengan indikator ke-9 s.d. 11 karena terkait dengan penyesuaian kegiatan persiapan SP2020. Perubahan yang mendasari perubahan indikator karena adanya perubahan metode pencacahan SP2020. Sebelumnya, pencacahan dilakukan secara *door to door* dengan media kertas atau PAPI, dan pembagian beban tugas berdasarkan blok sensus. Tahun 2020, SP dilakukan dengan menerapkan *combined method* dengan menggunakan data registrasi dari Kementerian Dalam Negeri-Direktorat Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data Dukcapil disusun berdasarkan satuan lingkungan setempat (SLS). Oleh karena itu, beban tugas petugas harus mengikuti data registrasi sehingga wilayah kerja statistik harus disusun berdasarkan SLS.

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data dari tahun 2015–2019 telah memenuhi target kinerja, bahkan melebihi target. Dari 8 (delapan) indikator kinerja yang telah ditetapkan, hanya indikator jumlah aktivitas layanan langsung terhadap konsumen yang secara rata-rata capaiannya belum memenuhi target. Pada tahun 2015, capaian indikator kinerja ini telah memenuhi target

(109%). Tetapi di 4 (empat) tahun berikutnya capaian indikator ini tidak dapat memenuhi target, dengan capaian terendah terjadi di tahun 2016 (69%). Menurunnya capaian indikator kinerja Jumlah aktivitas layanan langsung terhadap konsumen disebabkan sudah semakin banyak data dan informasi yang disajikan melalui *website* BPS yang dapat diakses secara mandiri oleh konsumen, sehingga jumlah layanan langsung cenderung menurun. Sementara itu, pada tahun 2015 indikator jumlah satker yang memiliki *website* terhubung secara *online* belum tersedia. Indikator ini mulai tersedia pada tahun 2016 dengan capaian yang telah memenuhi target di setiap tahunnya.

Pencapaian sasaran meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN selama periode 2015–2019 secara umum telah memenuhi target kinerja bahkan melebihi target. Pada tahun 2017 secara rata-rata capaian indikator kinerja pada sasaran ini berada di bawah target. Sumbangan terbesar terhadap rendahnya capaian kinerja ini adalah indikator jumlah instansi/institusi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dan jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi dengan nilai capaian masing-masing sebesar 4,35% dan 17,86%. Kedua indikator ini baru tersedia sejak tahun 2017. Melalui sosialisasi dan pembinaan statistik terkait dengan mekanisme pengajuan rekomendasi kepada kementerian/lembaga/instansi/dinas, capaian dari kedua indikator ini mulai dapat terpenuhi di tahun-tahun berikutnya.

Pencapaian sasaran terlaksananya kegiatan operasional statistik dengan dukungan layanan TI yang andal selama periode 2015–2019 secara umum telah memenuhi target kinerja. Pada tahun 2019 capaian beberapa indikator kinerja pada sasaran ini belum memenuhi target, yaitu indikator jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, indikator persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang diselesaikan, dan indikator jumlah dokumen pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi dengan nilai capaian 62,5%. Sedangkan untuk

indikator persentase permintaan alokasi *storage* yang ditindaklanjuti pada tahun 2017-2018 capaiannya melebihi target, yaitu sebesar 117,5%.

1.1.2. Inovasi dan Prestasi Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun 2015-2019

Inovasi-inovasi yang telah dicapai Deputi Bidang MIS pada tahun 2019 diantaranya:

1. Peningkatan/pengembangan sistem informasi terkait pengembangan metodologi sensus dan survei.

Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS) senantiasa mengembangkan sistem informasi/aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas metodologi pada kegiatan sensus dan survei. Pengembangan sistem informasi selama periode 2015-2019, sebagai berikut:

- a. Sistem Pengelolaan Kerangka Sampel (*iFrame*)

Telah dilakukan uji coba penggunaan *iFrame* pada beberapa survei bidang produksi antara lain Survei Komoditas strategis Kakao 2019, Survei Komoditas strategis Tebu 2019, dan Survei Hortikultura Potensi (SHOPI) 2019. Fungsi yang diujicobakan meliputi pengajuan metodologi survei, pengelolaan sampel, pengelolaan laporan daerah dan pengelolaan database rumah tangga.

- b. *Frame and Register System*

Pembangunan sistem pengelolaan kerangka sampel yang terintegrasi yaitu *Frame and Register System (FRS)* yang merupakan pengembangan dari sistem MFD Online dan *Iframe*. FRS masih dalam tahap pengembangan.

- c. Aplikasi Wilkerstat

Aplikasi Wilkerstat sebagai output pengembangan teknologi *Geographic Information System (GIS)* dalam bentuk aplikasi *mobile*. Aplikasi Wilkerstat digunakan untuk merekam posisi titik landmark batas dan infrastruktur dalam

bentuk *geotagging*. Titik tersebut digunakan untuk memperbarui bentuk dan posisi peta digital wilkerstat yang akan digunakan sebagai penunjuk wilayah bagi petugas saat pengumpulan data SP2020. Selain itu, aplikasi wilkerstat juga dikembangkan untuk kebutuhan beberapa survei lainnya.

d. *Geospatial System*

Geospatial System merupakan sistem informasi pengembangan dari dua aplikasi manajemen peta sebelumnya, yakni SIDIGIT (aplikasi manajemen peta digital) dan SIPETA (aplikasi manajemen peta analog). *Geospatial System* mengintegrasikan manajemen peta dan penggunaan *service* peta dengan sistem informasi lain yang digunakan di BPS.

2. Penyusunan/pengembangan sistem pendukung layanan diseminasi data dan informasi statistik.

Direktorat Diseminasi Statistik (DDS) senantiasa mengembangkan sistem informasi/aplikasi yang bertujuan agar pengelolaan data dan informasi dapat menyeluruh, terintegrasi, terpadu dan menghasilkan informasi cepat dan akurat yang pada akhirnya dihasilkan pelayanan berkualitas. Berikut ini prestasi DDS dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi/aplikasi selama periode 2015–2019:

a. Implementasi *Open Data Indonesia*

Website BPS merupakan salah satu media penyebarluasan data statistik dengan mengusung prinsip *easy to manage, multi device, multi view, dan dynamic table*. Pada tahun 2017 dilakukan Implementasi *Open Data Indonesia* pada *website* BPS sehingga informasi yang tersimpan pada seluruh *website* BPS yang tersebar pada 545 domain (1 domain BPS RI, 34 domain BPS provinsi, 510 domain BPS kabupaten/kota) akan menjadi lebih terbuka, hal ini sesuai dengan kriteria *open data* (melalui halaman opendatahandbook.org) bahwa data yang bersifat terbuka harus memenuhi kriteria *available and accessible, re-usable and redistribution, universal participation*.

b. Sistem Informasi Manajemen BRS (SIMBRS)

SIMBRS merupakan sistem yang dibangun untuk memudahkan pengelolaan terhadap penyusunan naskah BRS mulai dari pengusulan naskah oleh *subject matter* BPS hingga penyajian naskah pada saat hari rilis. Sistem ini dibangun sejak tahun 2018.

c. *Online Public Access Catalogue* (OPAC)

Implementasi aplikasi *Online Public Access Catalogue* (OPAC) mulai dibangun pada tahun 2017 sebagai sarana pelayanan kepada pengguna layanan perpustakaan BPS. OPAC menyediakan informasi katalog koleksi pustaka yang tersedia di perpustakaan BPS, aplikasi ini tidak menyediakan fasilitas unduh koleksi pustaka. OPAC dapat diakses secara *online* oleh pengguna layanan perpustakaan BPS dimana saja mereka berada tanpa harus datang ke perpustakaan BPS.

d. Pelayanan Statistik Terpadu (PST)-*Online*

Implementasi aplikasi Pelayanan Statistik Terpadu (PST)-*Online* mulai dibangun pada tahun 2017 sebagai sarana pelayanan kepada pengguna layanan perpustakaan BPS. PST-*Online* menggantikan aplikasi PST-*Offline* yang sudah diimplementasikan sejak tahun 2011. PST-*Online* menyediakan informasi katalog koleksi pustaka yang tersedia di perpustakaan BPS. Aplikasi ini menyediakan fasilitas unduh koleksi pustaka. PST-*Online* hanya dapat diakses oleh pengguna layanan yang datang ke perpustakaan BPS. PST-*Online* sudah diimplementasikan di BPS Pusat, BPS Provinsi, dan beberapa BPS Kabupaten/kota.

e. Portal Publikasi

Aplikasi yang mulai dibangun sejak 2015 ini bertujuan sebagai sarana pengelolaan publikasi yang dihasilkan oleh BPS baik publikasi *Advance Release Calendar* (ARC) maupun nonARC. Evaluasi publikasi/laporan, seperti

ketepatan waktu rilis publikasi dan kesesuaian pengemasan publikasi sesuai dengan standar dapat dilihat melalui aplikasi ini.

f. Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu Publikasi Statistik (SIMOTIK)

Pengembangan SIMOTIK bertujuan memudahkan monitoring mekanisme penerbitan publikasi, mulai dari awal persiapan *draft* publikasi (permintaan rancangan desain kover dan penomoran publikasi), rilis publikasi di *website* BPS, pencetakan, hingga distribusi publikasi sesuai *mailing list*. Dengan adanya SIMOTIK, monitoring dan evaluasi publikasi BPS dapat dioptimalkan sehingga kualitas layanan publik melalui publikasi BPS meningkat.

g. Aplikasi QR code

Aplikasi ini dibangun sebagai alternatif sarana pelayanan perpustakaan digital kepada pengguna ketika terjadi *error* pada PST-Online maupun jaringan komunikasi di perpustakaan BPS. QR-Code berisi *link softcopy* pustaka terbitan BPS, kemudian dapat diunduh file *softcopy* tersebut oleh pengguna. QR-Code yang sudah dibangun memuat *series* pustaka Statistik Indonesia dan TOP 100 pustaka terbitan BPS yang paling banyak diakses pengguna sampai dengan Agustus 2018. QR-Code dalam tahap ujicoba implementasi di perpustakaan BPS Pusat.

h. Romantik Online

Sesuai dengan UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, instansi pemerintah yang akan melakukan kegiatan statistik diwajibkan melaporkan kegiatan statistik yang akan dilaksanakan kepada BPS. Setelah diteliti dan diproses oleh BPS, akan dikeluarkan suatu rekomendasi yang menyatakan kegiatan yang bersangkutan layak atau tidak untuk dilanjutkan. Tujuan pelaporan kegiatan statistik adalah untuk melengkapi Sistem Statistik Nasional (SSN), agar dalam mengadakan kegiatan statistik tidak terjadi duplikasi kegiatan statistik. Pada 26 Maret 2019, telah dirilis sebuah aplikasi berbasis web untuk pengajuan

rancangan survei statistik sektoral yang diberi nama dengan Aplikasi Romantik *Online*. Aplikasi ini dapat diakses melalui <https://romantik.bps.go.id>.

i. Sistem Informasi Rujukan Statistik (Sirusa)

Sirusa merupakan sistem untuk mengelola dan menyajikan metadata statistik, baik itu metadata kegiatan statistik maupun metadata variabel dan/atau indikator yang dihasilkan dalam kegiatan statistik yang dimaksud. Sistem ini terdiri dari dua komponen pokok, yaitu *front-end system* dan *back-end system* yang dikelola secara terpadu. *Front-end system* dan *back-end system* telah dibangun pada tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2019, kedua sistem tersebut tidak mengalami banyak perubahan. Namun demikian, pengembangan kedua sistem tersebut tetap dilakukan, misalnya memperbaiki fitur maupun *error* yang baru diketahui saat perekaman data pada *back-end system*. Sedangkan pada fitur yang diperbaiki yaitu pada grafik dan tabel rekapitulasi hasil perekaman metadata sektoral. Pada fitur ini, pengguna dapat memilih tabel dan grafik tidak hanya pada tahun berjalan, tetapi juga pada tahun sebelumnya dengan memilih tahun yang diinginkan.

j. Sistem Informasi Manajemen Data Statistik Terintegrasi (SIMDASI)

Sistem ini dibangun dalam upaya mengharmonisasi kegiatan pengumpulan data DDA dengan rencana dan strategi pembangunan Satu Data Indonesia. Dalam pelaksanaan pengumpulan data DDA dan Statistik Indonesia, inkonsistensi data antar level wilayah acapkali ditemui. SIMDASI dibangun dengan salah satu tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah inkonsistensi data. Sebagai langkah awal, BPS berfokus pada konsistensi angka yang disajikan pada publikasi Statistik Indonesia (SI) untuk data level Nasional dan Daerah Dalam Angka (DDA) untuk data level regional/daerah. Melalui SIMDASI, sinkronisasi data dapat ditingkatkan karena adanya standarisasi data, mekanisme pemeriksaan data yang sesuai standar, mekanisme interoperabilitas untuk mengurangi kesalahan mengambil data, dan

fitur untuk melihat tingkat dan masalah dalam sinkronisasi. Capaian implementasi SIMDASI pada 2019 antara lain dapat dilihat dari jumlah tabel yang menjadi kor dan tingkat sinkronisasi dari tabel-tabel kor tersebut. Tabel kor adalah tabel yang wajib ada di seluruh wilayah dengan format dan standar yang sama. Pada tahun 2019, ada 120 tabel kor SIMDASI provinsi dan 42 tabel kor SIMDASI kabupaten/kota (tabel tersedia pada publikasi DDA). Aplikasi ini senantiasa selalu dikembangkan dengan beragam fitur lainnya yang bertujuan untuk menyajikan data yang lebih berkualitas.

k. Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik)

Silastik merupakan sistem pelayanan data yang terintegrasi dengan sistem pendukung diseminasi lain di BPS. Silastik berfokus pada permintaan data dan konsultasi statistik. Data yang disajikan beragam mulai dari data mikro hasil sensus/survei, publikasi *softcopy non-watermark*, publikasi *hardcopy*, data mikro dengan olahan (tabulasi), hingga peta digital wilayah kerja statistik. Melalui Silastik pengguna dapat melakukan konsultasi terkait produk dan pembelian data BPS secara mudah dan cepat, juga dapat melakukan pembayaran melalui *virtual account (billing)* serta dukungan pengiriman data melalui internet. Selain itu, pengguna data dapat memantau perkembangan permintaan data yang sudah diajukan dengan pasti dan transparan (*real time progress monitoring*). Silastik dibangun untuk mendukung sistem pelayanan data yang akuntabel, di mana setiap transaksi terdokumentasi termasuk seluruh komunikasi serta riwayat transaksi pengguna data. Silastik dibangun pada tahun 2018 dan dapat diakses melalui silastik.bps.go.id.

l. Aplikasi pengumpulan data Survei Kebutuhan Data (SKD) dengan menggunakan metode *Computer Assisted Web Interviewing (CAWI)* dengan mengembangkan SKD *Online*.

3. Transformasi TI dan Pengembangan Sistem Statistik Terintegrasi.

Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS) berperan aktif dalam transformasi TI. Pada tahun 2017, transformasi TI meliputi:



Selanjutnya pada tahun 2018, progres transformasi TI meliputi:



Sementara itu, pengembangan Sistem Statistik Terintegrasi pada tahun 2019 meliputi:



-  **Integrated Collection System**
-  **Integrated Processing System**
-  **Macro Analysis System**
-  **Integrated Dissemination System**

Core

Enabler

Sistem-sistem yang mendukung sistem utama dan memungkinkan terwujudnya sistem yang terintegrasi.

-  **Data Management System**
Di 2018, dilakukan pembangunan Data Lake yang akan menjadi *Single Source of Truth* untuk data di BPS. Migrasi data akan mulai dimasukkan ke dalam Data Lake di 2019.
-  **Metadata Management System**
Sistem untuk mengelola semua metadata di BPS, sehingga ada keseragaman metadata di semua subject matter. *Metadata DWM* akan meningkatkan kualitas data BPS.
-  **Frame and Register System**
Memfasilitasi penyediaan dan pengelolaan kerangka sampel yang dibutuhkan Collection System dan terintegrasi dengan sistem lainnya, seperti DMS dan DPS.
-  **Geospatial System**
Membangun sistem yang dapat terintegrasi dengan sistem pemetaan di daerah, dan sistem yang dapat mengoptimalkan fungsi peta pada CAP.

Management

Sistem-sistem yang mengelola seluruh sistem yang ada termasuk memfasilitasi kebutuhan stakeholder dalam menggunakan sistem-sistem tersebut.

-  **API Management Tools**
Bersus sistem yang dibangun dirancang agar berbasis SOA agar memudahkan pengembangan sistem selanjutnya, namun dapat tetap terintegrasi. Diperlukan API management tools agar komunikasi antar sistem tetap lancar.
-  **Digital EA**
Digital repository untuk struktur proses bisnis, data, aplikasi dan teknologi serta relasi diantaranya. Fungsi DEA, impact analysis, gap analysis, roadmap visualization dan IT asset lifecycle untuk mempermudah pengambilan keputusan.
-  **Operational Management System**
Memfasilitasi kebutuhan seluruh pegawai untuk berkolaborasi dalam bekerja, berkomunikasi dan membangun *One BPS*. *Portal*, yang menyimpan semua informasi di BPS.
-  **IT Service Management Tools**
HaloSIE akan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan untuk untuk area lain diluar TI, dengan portalkan IIR (diantaranya pengembangan Knowledge Management).

4. Keterlibatan dengan kegiatan internasional.
 - a. Menjadi narasumber dalam kegiatan *International Workshop on the Statistical Metadata standard and its application* di Beijing, China pada tanggal 22-24 April 2015.
 - b. Mengikuti *Training of Trainer Infographic Series ASEAN*. Dalam rangka peningkatan pelayanan diseminasi, ASEAN berinisiatif untuk mengembangkan metode diseminasi data melalui infografis. Untuk itu ASEAN menyelenggarakan pelatihan infografis dengan peserta perwakilan dari *National Statistical Office (NSO)* di seluruh Negara ASEAN. DDS sebagai perwakilan dari BPS Indonesia ikut berpartisipasi sebagai peserta dan sebagai trainer. Prestasi yang didapatkan dari pelatihan tersebut, BPS Indonesia mendapatkan predikat *The Most Educational Glossary Infographics. Training of trainer* dilaksanakan oleh ASEAN bekerja sama dengan pihak konsultan GIZ (German).
 - c. Berperan aktif dalam kegiatan IMT-GT. *The Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)* adalah inisiatif kerjasama regional sub dibentuk pada tahun 1993 oleh pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk mempercepat transformasi ekonomi di provinsi kurang berkembang.
 - d. Berperan aktif dalam kegiatan BIMP-EAGA. Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur (BIMP-EAGA) adalah sebuah inisiatif kerjasama ekonomi anak wilayah di Asia Tenggara. Organisasi tersebut memiliki 4 anggota yang terdiri dari Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipina.
5. Memprakarsai kegiatan Rakor Kapusdatin K/L dan Diskominfo Provinsi dengan tajuk "Satu Data Indonesia Menuju Revolusi Industri 4.0". Dalam rakor ini dilakukan sosialisasi Satu Data Indonesia, sosialisasi sinkronisasi data sektoral di tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota, sosialisasi interoperabilitas data antar kementerian/lembaga (SIMDASI).

6. Bekerjasama dengan Paris21/OECD untuk menginisiasi penyusunan *draft* NSDS Indonesia, atau yang selanjutnya disebut dengan “Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI)” yang digunakan sebagai kerangka kerja pengembangan statistik dalam mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien dalam tataran internasional.
7. Pada tahun 2015 terlibat dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi kementerian/lembaga pemerintah lain, yaitu:
 - a. Penyempurnaan Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN), yang dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara.
 - b. Penyempurnaan dan pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), yang dilakukan oleh Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri.
8. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) BPS dengan Kemenkeu untuk perolehan data wajib pajak sebagai sumber pemutakhiran data administratif SBR secara reguler.
9. Penggunaan data SBR pasca Sensus Ekonomi 2016. Data SBR mulai digunakan sebagai kerangka (*frame*) survei *subject matter* secara bertahap. Kegiatan *updating* direktori pariwisata dan dilanjutkan Survei Statistik Pariwisata tahun 2019 menggunakan data SBR hasil integrasi dengan *subject matter* Statistik Pariwisata yang hasil pencacahan lapangan dikembalikan ke SBR untuk input pemutakhiran data SBR. Data tersebut juga dipetakan dan dilengkapi dengan kode wilayah kerja statistik dan *geocode* (*latitude* dan *longitude*). Data SBR yang telah diperbarui dipersiapkan untuk kembali digunakan sebagai kerangka survei Statistik Pariwisata pada tahun 2020. Metode ini disebut pemutakhiran *survey feedback* yang akan berjalan secara reguler.
10. Penghargaan
 - a. Menerima penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi dari ORI tentang Standard Pelayanan Publik sebagai implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 untuk penilaian di tahun 2015.

- b. Meraih penghargaan sebagai *Stand* Pameran Terbaik pada kegiatan Pameran Rapat Koordinasi Nasional APKASI 2018.
- c. *Website* BPS meraih penghargaan sebagai peringkat ke-2 se-Asia Tenggara dan peringkat ke-27 dari 180 Kantor Statistik Negara di dunia pada penilaian *Open Data Inventory 2017* yang diselenggarakan oleh *Open Data Watch* di tahun 2018. Komponen yang diukur pada penilaian tersebut adalah Cakupan (*Coverage*) dan Keterbukaan (*Openness*). Unsur yang dinilai pada komponen *Coverage* adalah cakupan data serta level disagregasi data. Adapun unsur yang dinilai pada komponen *Openness* adalah kemudahan dalam akses data, termasuk ketersediaan fitur mempublikasikan data dalam format yang mudah dibaca seperti csv, ataupun MS Excel.
- d. Menerima penghargaan Wajib Serah Karya Cetak dan Karya Rekam dari Perpustakaan Nasional RI Tahun 2018. BPS mendapatkan penghargaan atas ketertiban dan kelengkapan dalam penyerahan laporan/publikasi (karya cetak) yang dibuat dan dikirimkan oleh semua unit kerja BPS Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota ke Perpustakaan Nasional maupun Perpustakaan Daerah.
- e. Menerima penghargaan dari Penilaian Kinerja Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh KemenPANRB. BPS mendapatkan penghargaan "Sangat Baik" atas kinerja pelayanan publik.
- f. Menerima penghargaan dari *OpenGovt Asia* atas inovasi penggunaan Aplikasi Wilkerstat dalam bidang pemanfaatan teknologi geospasial dalam pelayanan publik yang semakin cepat, *smart*, efisien, dan transparan.
- g. *President's Award in the Category of Data Driven Architecture* untuk *Enterprise Architecture* (EA) BPS dalam *The Open Group Award 2019*.
- h. Penghargaan untuk Penyelenggaraan SPBE dari KemenPANRB, yaitu predikat "Baik" untuk tingkat Lembaga Pemerintah Non Kementrian.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi yang dimiliki

BPS memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat menjawab tantangan jaman dan permasalahan yang ada. Potensi besar yang dimiliki oleh BPS, meliputi posisi BPS sebagai Pembina Sistem Statistik Nasional seperti yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 1997; adanya Perpres No. 39 Tahun 2019 yang mengatur tentang Tata Kelola Satu Data Indonesia (SDI) yang semakin memantapkan posisi BPS sebagai Pembina Data Statistik yang mengatur 3 (tiga) dari 4 (empat) prinsip SDI, yakni standar data, metadata baku dan kode referensi; kedudukan selaku NSO (*National Statistical Office*) di Indonesia membuat BPS diakui sebagai Penyedia Data Statistik yang Berkualitas dan Independen baik di level Nasional maupun Internasional.

Deputi Bidang MIS sebagai bagian dari BPS berupaya memenuhi tugas dan fungsi sesuai amanat Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei yang berada di bawah Deputi Bidang MIS dalam perjalanan mengemban tugasnya telah berupaya memenuhi kebutuhan kegiatan statistik kependudukan, pertanian, dan bidang ekonomi. Khusus kegiatan statistik bidang ekonomi telah dilakukan pengembangan kerangka sampel melalui pembangunan *Statistical Business Register*. Namun demikian, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei terus melakukan pengembangan desain sensus dan survei, klasifikasi dan standardisasi statistik, kerangka sampel, dan pemetaan statistik. Deputi Bidang MIS secara umum dan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei secara khusus harus dapat memberi wawasan dan melakukan pembinaan terkait metodologi sensus dan survei yang mencakup semua aspek. Selain itu, tugas yang tak kalah penting bagi Direktorat PMSS serta menjadi tugas Deputi Bidang MIS dan BPS secara keseluruhan adalah pembinaan statistik

sektoral di bidang metodologi survei serta sebagai pembina standar data dalam implementasi Satu Data Indonesia.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan data statistik sektoral dan banyaknya jenis data baru yang harus dikumpulkan, Deputi Bidang MIS melalui Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei berperan mengembangkan metodologi sensus dan survei dengan metode terkini untuk mendukung setiap produsen data dalam menghasilkan data sesuai prinsip Satu Data Indonesia.

Dalam mendukung tugas Deputi Bidang MIS khususnya terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi, Deputi Bidang MIS melalui Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei mengembangkan penyelenggaraan statistik agar mampu memenuhi kebutuhan pengguna data statistik yang akurat dan semakin beragam. Potensi kemajuan di bidang metodologi meliputi pengembangan desain survei, pengelolaan kerangka sampel area, pengembangan dan pengelolaan sistem pemetaan statistik, pengelolaan sistem klasifikasi statistik, pengelolaan *Statistical Business Register* serta pembangunan standardisasi statistik.

Di sisi lain, untuk mewujudkan pelayanan statistik berkualitas, Direktorat Diseminasi Statistik yang berada di bawah Deputi Bidang MIS telah menetapkan Standar Pelaksanaan Pelayanan Statistik sebagaimana telah tertuang dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 630 Tahun 2019. Dengan telah tersedianya Standar Pelaksanaan Pelayanan Statistik, publik memperoleh kepastian bahwa pelayanan yang diterima sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Pelayanan diseminasi yang diberikan kepada publik di pusatkan pada suatu pusat Pelayanan Statistik Terpadu (PST).

Sehubungan dengan tugas Direktorat Diseminasi Statistik dalam pengelolaan rujukan statistik, untuk mendukung perwujudan Sistem Statistik Nasional, upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik dalam penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik). Hal ini diperkuat dengan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Di dalam Perpres ini, BPS bertindak sebagai pembina data statistik yang memiliki tugas menetapkan struktur baku dan format baku metadata yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Dalam hal ini, Direktorat Diseminasi Statistik telah menyusun struktur baku dan format baku metadata yang menjadi acuan bagi instansi pemerintah, serta telah memiliki sistem proses pemberian rekomendasi kepada instansi pemerintah.

Potensi besar yang dimiliki Direktorat Sistem Informasi Statistik sebagai bagian dari Deputi Bidang MIS adalah adanya infrastruktur *Data Center* yang berada di BPS RI dan *Data Recovery Center* di Kalimantan Selatan yang mempunyai kapasitas penyimpanan data dan kemampuan komputasi yang sangat tinggi serta ketersediaan SDM yang mempunyai kapabilitas di bidang Komputasi dan Statistik serta adanya transformasi TI dan pengembangan sistem statistik terintegrasi yang meliputi *Integrated Collection System, Integrated Processing System, Macro Analysis System, Integrated Dissemination System, Data Management System, Metadata Management System, Frame and Register System, Geospatial System, API Management Tools, Digital EA, Operational Management System, dan IT Service Management Tools*.

1.2.2. Permasalahan yang dihadapi

Dalam pengembangan di bidang metodologi, diseminasi statistik, dan sistem informasi statistik, unit kerja di bawah Deputi Bidang MIS tidak luput dari beberapa permasalahan yang harus dihadapi, baik yang berakibat pada kegiatan teknis maupun administrasi. Secara umum permasalahan tersebut antara lain:

1. Tuntutan kualitas dan keragaman data dari pemerintah dan pemangku kepentingan kepada BPS menyebabkan peningkatan beban kerja Deputi Bidang MIS dan unit-

unit kerja di bawahnya sangat tinggi sehingga tidak seimbang dengan jumlah SDM yang ada.

2. Peningkatan kapasitas SDM di bidang metodologi sensus dan survei belum dapat dilakukan secara rutin.
3. Permasalahan teknis yang ditemui adalah belum optimalnya implementasi tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik yang sesuai dengan *Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)*.
4. Masih rendahnya peningkatan inovasi dalam pengemasan publikasi maupun informasi statistik lainnya, misalnya visualisasi data lewat infografis maupun *multimedia for data visualization*. Namun dukungan *software* program yang terkait dengan visualisasi publikasi ini perlu ditingkatkan.
5. Belum adanya kebijakan diseminasi (*dissemination policy*) yang lengkap dalam mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
6. Belum adanya pembaharuan peraturan terkait Pelayanan Statistik Terpadu.
7. Belum terintegrasinya sistem diseminasi statistik.
8. Belum terlatihnya sumber daya manusia yang ada sehingga tidak maksimal dalam menghasilkan output publikasi yang diterbitkan baik dari sisi *publishing* maupun ketatabahasaan.
9. Masih terbatasnya sumber daya manusia berkemampuan bahasa Inggris dan komputasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Pelayanan Statistik Terpadu (PST).
10. Perlu peningkatan terus menerus mengenai layanan publik, baik yang bersifat sarana dan prasarana maupun petugas yang melayani.
11. Masih banyaknya buku-buku publikasi dalam bentuk *hardcopy* yang perlu dilakukan perubahan ke arah *softcopy*.
12. Masih rendahnya kesadaran K/L/D/I dalam melaporkan metadata kegiatan statistik sektoral ke BPS.

13. Belum efektifnya pelaksanaan pembinaan statistik sektoral dalam mewujudkan kemandirian K/L/D/I melaksanakan kegiatan statistik.
14. Masih sedikitnya kegiatan promosi produk-produk statistik.
15. Lemahnya kesadaran terhadap pentingnya data berkualitas, pemahaman yang kurang tepat, serta belum optimalnya pemanfaatan data dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan baik Pemerintah maupun BPS sendiri.
16. Berbagi data sering terbentur oleh regulasi yang mengedepankan *confidentiality* dan *privacy*. Belum optimalnya implementasi *open data* meskipun sudah ada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemanfaatan *big data* juga dirasa masih lemah, membutuhkan waktu yang Panjang dan kolaborasi berbagai pihak untuk dapat menghasilkan *insight* yang berkualitas.
17. Pemanfaatan data administratif atau data transaksional dan *big data* menuntut adanya platform data baru untuk penyimpanan data yang volumenya besar dan tidak terstruktur, terintegrasi, memiliki performa komputasi yang tinggi, dan sistem keamanan yang melindungi terjadinya kebocoran data individu. Platform baru ini juga diharapkan bisa menciptakan lingkungan baru berupa *digital Government*, yang dapat mendorong inovasi digital baru yang didukung dengan data.
18. Seiring dengan perkembangan teknologi digital dan pengelolaan data, maka peningkatan kapabilitas SDM baik di area *Data Science, Analytics and Visualization, Cloud Services, Internet of Things, Cyber Security, AI and Machine Learning*.

BAB II



BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN DEPUTI BIDANG METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK

2.1. Visi Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

Renstra BPS yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPS No 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020 – 2024 menyatakan bahwa visi dari BPS untuk tahun 2020 – 2024 yaitu “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”.

Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.

Dengan visi baru ini, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik.

Untuk mendukung visi BPS tersebut, maka dirumuskanlah visi Deputi Bidang Metodologi Informasi Statistik, yaitu:

“PENYEDIA METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK BERKUALITAS UNTUK INDONESIA MAJU”

Rumusan visi tersebut merupakan komitmen bersama, mengingat besarnya kompleksitas permasalahan pembangunan statistik yang maju agar mampu menghasilkan *official statistics* yang dibutuhkan masyarakat dan dapat dibandingkan hasilnya dengan *Nasional Statistics Office* (NSO) negara lain dan penyediaan

pelayanan prima di bidang statistik serta dukungan infrastruktur dan pengintegrasian sistem statistik. Sehingga, di masa mendatang BPS dapat menjadi rujukan perstatistikan di dunia internasional. Perlu juga digarisbawahi pencapaian visi memerlukan kecermatan dan kematangan dalam perencanaan program dan kegiatan tahunan yang berfokus pada skala prioritas tujuan organisasi yang harus dicapai. Sehingga, pengukuran kinerja pun harus dapat ditentukan secara tepat agar dapat menjadi evaluasi pencapaian target kinerja.

2.2. Misi Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Deputy Bidang MIS yang menggambarkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan demi pencapaian visi. Misi dari Deputy Bidang MIS tahun 2020–2024 dapat ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengembangkan metodologi survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas, baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik serta pemetaan wilayah kerja statistik untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) dan Satu Data Indonesia (SDI)
2. Membina K/L/D/I untuk metodologi dan pelaksanaan kegiatan statistik
3. Meningkatkan layanan statistik dan layanan TI untuk mendukung Sistem Statistik Nasional

Uraian penjelasan dalam misi Deputy Bidang MIS tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Mengembangkan metodologi survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas, baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik serta pemetaan wilayah kerja statistik untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) dan Satu Data Indonesia (SDI)
Deputy Bidang MIS merupakan penyedia metodologi sensus dan survei, baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik serta pemetaan wilayah kerja untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) dan Satu Data Indonesia (SDI). Dalam menyediakan metodologi sensus

dan survei, pengembangan metodologi perlu dilakukan agar metodologi yang diterapkan dalam kegiatan sensus dan survei merupakan metodologi yang andal, efektif, dan efisien serta mengacu pada standar internasional dengan didukung oleh sistem dan pengelolaan TI sehingga menghasilkan data yang berkualitas.

2. Membina K/L/D/I untuk metodologi dan pelaksanaan kegiatan statistik
Deputi Bidang MIS mendukung mandat BPS yaitu melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. Deputi Bidang MIS perlu meningkatkan pembinaan terhadap instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep dan standar, serta memberikan rekomendasi penyelenggaraan pengumpulan data.
3. Meningkatkan layanan statistik dan layanan TI untuk mendukung Sistem Statistik Nasional
Dalam penyediaan layanan, kepuasan pengguna menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud dengan adanya layanan pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan standar pelayanan.

2.3 Tujuan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

Tujuan Deputi Bidang MIS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS pada tahun 2020–2024 adalah:

1. Tersedianya metodologi dan sistem yang andal dan terstandar untuk tersedianya statistik berkualitas;
2. Meningkatnya kolaborasi dengan K/L/D/I untuk pelaksanaan kegiatan statistik;
3. Meningkatnya kualitas layanan statistik dan layanan TI untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN)

2.4 Sasaran Strategis Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai oleh Deputi Bidang MIS. Berikut ini merupakan sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja (IKU), yang disusun menggunakan pendekatan metode *Balance Score Card* (BSC).

Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik 2020–2024

Tujuan/Sasaran/Indikator Kinerja Utama
Tujuan 1. Tersedianya metodologi dan sistem yang andal dan terstandar untuk tersedianya statistik berkualitas
Sasaran 1.1. Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas
Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas
Sasaran 1.2. Meningkatnya kualitas layanan TI dengan dukungan tata kelola TI, Sistem Terintegrasi dan Jaringan komunikasi yang andal
Indeks Kepuasan Layanan TI
Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi dengan K/L/D/I untuk pelaksanaan kegiatan statistik
Sasaran 2.1. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan K/L/D/I dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik
Tujuan 3. Meningkatnya kualitas layanan statistik dan layanan TI untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN)
Sasaran 3.1. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional
Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan

BAB III



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

Arah kebijakan penyelenggaraan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik (MIS) mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 35 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik Badan Pusat Statistik Tahun 2020–2024.

Fokus arah kebijakan dan strategi yang akan diampu oleh Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik (arah kebijakan dan strategi nomor 1, 2 dan 5), adalah:

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta;

Arah kebijakan yang dapat mendukung pencapaian tersebut yaitu terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI).

Strategi yang dilakukan:

- a. Meningkatkan harmonisasi kegiatan survei; dan
 - b. Mengurangi tumpang tindih kegiatan survei serta mengoptimalkan integrasi survei.
2. Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data;
Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
 - a. Pengembangan infrastruktur statistik nasional untuk mendukung SSN;
 - b. Penguatan implementasi SSN dengan pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional;
 - c. Pembinaan K/L/D/I dalam rangka penyediaan statistik sektoral.

Strategi yang dilakukan:

- a. Meningkatkan komunikasi dengan responden;
 - b. Memperbaiki metode pengumpulan data;
 - c. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang statistik;
 - d. Membuat *customer relationship management*;
 - e. Menyusun data mining pengguna data;
 - f. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data; dan
 - g. Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik.
3. Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia;

Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia.

Strategi yang dilakukan:

- a. Meningkatkan penerapan standar penjaminan kualitas dalam kegiatan statistik; dan
- b. Menyusun indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Arah kebijakan penyelenggaraan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS) diturunkan mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi, misi, dan tugas fungsi Deputi Bidang MIS. Fokus arah kebijakan dan strategi Direktorat PMSS Tahun 2020-2024 yang selaras dengan arah kebijakan Deputi Bidang MIS terkait layanan metodologi sensus dan survei, sebagai berikut:

1. Penyediaan metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk mewujudkan data statistik berkualitas;
2. Peningkatan penggunaan standar data dan klasifikasi statistik serta kode referensi di Indonesia;

3. Penyediaan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran;
4. Penyediaan peta wilayah kerja statistik yang akurat;
5. Penyediaan publikasi *Metropolitan Statistical Area* (MSA); dan
6. Penyelenggaraan pembinaan dan/atau kerja sama dalam kegiatan statistik (baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan wilayah kerja statistik).

Sedangkan strategi yang menjadi fokus diterapkan di lingkungan Direktorat PMSS adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien;
2. Meningkatkan kualitas kerangka sampel yang terintegrasi dengan informasi geospasial yang akurat;
3. Meningkatkan penggunaan daftar induk dan kode referensi dalam kegiatan statistik di Indonesia;
4. Meningkatkan penggunaan standar data, termasuk klasifikasi statistik, yang berkualitas dalam kegiatan statistik di Indonesia;
5. Menyediakan publikasi *Metropolitan Statistical Area* (MSA); dan
6. Melaksanakan pembinaan dan/atau kerja sama dalam kegiatan statistik dengan K/L/D/I dalam bidang metodologi sensus dan survei untuk membangun Satu Data Indonesia.
7. Mengembangkan sistem/aplikasi untuk mendukung penguatan metodologi sensus dan survei di lingkungan Direktorat PMSS guna peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja serta dapat meningkatkan pelayanan bagi pengguna data dan penyelenggara kegiatan statistik;
8. Meningkatkan sistem kerja melalui kebijakan *reward and punishment* dalam rangka menciptakan penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien;
9. Meningkatkan koordinasi antar deputi, direktorat, dan daerah dalam perencanaan sensus dan survei; dan

10. Meningkatkan penerapan proses bisnis penyelenggaraan kegiatan statistik yang sesuai dengan *Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)*.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Diseminasi Statistik

Arah kebijakan Direktorat Diseminasi Statistik ditetapkan dengan mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi, misi, dan tugas fungsi Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik. Fokus arah kebijakan Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2020–2024 yang selaras dengan arah kebijakan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, sebagai berikut:

- a. Peningkatan kematangan sistem diseminasi statistik dalam rangka penguatan tata kelola diseminasi; dan
- b. Peningkatan pelayanan statistik terpadu secara efektif dan efisien.

Strategi yang dilakukan DDS untuk mencapai arah perubahan tersebut adalah :

- a. Meningkatkan kualitas layanan statistik; dan
- b. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem di lingkungan DDS guna mengoptimalkan kegiatan diseminasi statistik.

Sehingga dari arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik 2020–2024 tersebut diturunkan menjadi arah kebijakan dan strategi DDS 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Deputi Bidang Bidang Metodologi dan Informasi Statistik dalam rangka “peningkatan koordinasi kegiatan statistik”, diturunkan menjadi arah kebijakan DDS “Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN”.

Strategi yang dilakukan adalah:

- a. Meningkatnya koordinasi kegiatan statistik sebagai pembina statistik dalam kerangka Satu Data Indonesia; dan
- b. Meningkatnya penggunaan sistem aplikasi romantik sebagai sarana konsultasi, penerbitan dan monitoring rekomendasi kegiatan statistik sektoral

2. Arah kebijakan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik dalam rangka “peningkatan kematangan sistem diseminasi statistik dalam rangka penguatan tata kelola menjadi diseminasi yang terintegrasi dan peningkatan pelayanan berkualitas dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional” diturunkan menjadi arah kebijakan DDS dalam “peningkatan hubungan dengan pengguna”.

Strategi yang dilakukan Direktorat Diseminasi Statistik untuk mencapai arah kebijakan tersebut adalah:

- a. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan unit kerja dari instansi terkait data dan informasi;
- b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana TIK dan sarana kerja lainnya, dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan publik BPS;
- c. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem di lingkungan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik guna mengoptimalkan Monitoring dan Evaluasi proses pelayanan data; dan
- d. Merumuskan grand design smart service

3.4. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Sistem Informasi Statistik

Arah kebijakan Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS) ditetapkan dengan mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi, misi, dan tugas fungsi Deputi Bidang MIS. Fokus arah kebijakan dan strategi Direktorat SIS Tahun 2020–2024 yang selaras dengan arah kebijakan Deputi Bidang MIS, yaitu meningkatkan peran Direktorat SIS dalam rangka meningkatkan infrastruktur dan pengintegrasian sistem statistik, melalui arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penyediaan *platform data hub* yang atraktif, kolaboratif dan terpercaya untuk mewujudkan Satu Data Indonesia;

2. Peningkatan kualitas layanan TI dengan dukungan tata kelola TI, sistem terintegrasi dan jaringan komunikasi yang andal; dan

3. Perwujudan keselarasan strategi bisnis dan TI dalam kerangka transformasi digital. Sedangkan strategi yang menjadi fokus diterapkan di lingkungan Direktorat SIS adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem di lingkungan Direktorat Sistem Informasi Statistik guna mengoptimalkan kegiatan diseminasi statistik;
2. Penyelenggaraan integrasi dan pengolahan data dengan dukungan jaringan komunikasi yang andal;
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana TIK dan sarana kerja lainnya, dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan publik BPS;
4. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem di lingkungan Deputy Metodologi dan Informasi Statistik guna mengoptimalkan monitoring dan evaluasi proses pelayanan publik; dan
5. Merumuskan *grand design smart service*.

Sehingga dari arah kebijakan dan strategi Deputy Bidang MIS 2020–2024 untuk meningkatkan peran Direktorat SIS dalam rangka meningkatkan infrastruktur dan pengintegrasian sistem statistik tersebut diturunkan menjadi arah kebijakan dan strategi Direktorat SIS 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan platform *data hub* yang atraktif, kolaboratif dan terpercaya untuk mewujudkan Satu Data Indonesia. Arah kebijakan ini diselaraskan dengan strategi Direktorat Sistem Informasi Statistik, yaitu: Tersedianya platform *data hub* yang atraktif, kolaboratif dan terpercaya untuk mewujudkan Satu Data Indonesia. Arah kebijakan dan strategi ini akan mendukung terintegrasinya sistem layanan TI yang andal untuk penyelenggaraan kegiatan statistik nasional dan meningkatkan peran Sistem Informasi Statistik Terintegrasi dalam mendukung Sistem Statistik Nasional.

2. Peningkatan kualitas layanan TI dengan dukungan Tata Kelola TI, sistem terintegrasi dan jaringan komunikasi yang andal. Arah kebijakan ini diselaraskan dengan strategi Direktorat Sistem Informasi Statistik, sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kualitas layanan TI untuk aspek aksesibilitas, kemudahan dan kecepatan pelayanan dengan dukungan Tata Kelola TI
 - b. Tersedianya pengelolaan layanan TI yang andal dengan dukungan sistem terintegrasi dan jaringan komunikasi yang andal

Arah kebijakan dan strategi ini akan mendukung peningkatan kualitas Layanan TI yang berorientasi kepada pengguna.

3. Perwujudan keselarasan Strategi Bisnis dan TI dalam kerangka transformasi digital. Arah kebijakan ini diselaraskan dengan strategi Direktorat Sistem Informasi Statistik, sebagai berikut:
 - a. Terwujudnya keselarasan Strategi TI dan Bisnis dengan *digital EA*.
 - b. Terwujudnya Tata Kelola TI yang terstandardisasi, terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi kepada pengguna.
 - c. Terwujudnya transformasi digital untuk membangun BPS yang *Smart* dan *Agile*.

Arah kebijakan dan strategi ini akan mendukung terwujudnya Transformasi Digital yang mendukung keselarasan Strategi TI dan Bisnis dalam kerangka Sistem Statistik Nasional.

3.5. Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, serta kewenangannya diperlukan kerangka regulasi untuk mendukung proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis Deputi Bidang MIS selama jangka waktu tahun 2020 – 2024. Beberapa regulasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan di Deputi Bidang MIS adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
3. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
7. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2019
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik
12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik
13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik

14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota
15. Peraturan Kepala BPS No. 78 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik
16. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik;
17. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 94 Tahun 2018 tentang Rencana Transformasi Digital Badan Pusat Statistik.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran BPS diperlukan kerangka organisasi sebagai perwujudan kerangka kelembagaan. Organisasi yang disusun harus selaras dengan visi dan misi BPS dalam mencapai penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien. Sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang pengembangan metodologi sensus dan survei, diseminasi statistik, dan sistem informasi statistik;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengembangan metodologi sensus dan survei, diseminasi statistik, dan sistem informasi statistik;

- c. pelaksanaan pengembangan metodologi sensus dan survei, diseminasi statistik, dan sistem informasi statistik; dan
- d. pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Adapun susunan organisasi Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik terdiri atas:

- a. Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei;
- b. Direktorat Diseminasi Statistik; dan
- c. Direktorat Sistem Informasi Statistik

3.6. Program dan Kegiatan

Program yang dijalankan di Deputi Bidang MIS adalah 1 (satu) program generik yaitu Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Dari program tersebut kemudian dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit Eselon II di lingkungan Deputi Metodologi dan Informasi Statistik dan dilaksanakan juga di BPS Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

Kegiatan yang diampu oleh Direktorat PMSS, yaitu mengembangkan desain sensus dan survei, standar data dan klasifikasi statistik, kerangka sampel, dan pemetaan statistik. Dalam pelaksanaan kegiatan pokok tersebut dijabarkan menjadi komponen-komponen yang menjadi tanggung jawab masing-masing eselon III di lingkungan Direktorat PMSS. Komponen tersebut antara lain:

1. Pemenuhan dan peningkatan kualitas metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas;
2. Pemenuhan dan peningkatan kualitas dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran;
3. Pemenuhan dan pengembangan publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data;

4. Pemenuhan dan peningkatan kualitas master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas;
5. Pelayanan pembinaan dan/atau kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei.

Sementara itu, kegiatan yang diampu oleh Direktorat Diseminasi Statistik, yaitu melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan rujukan statistik, publikasi dan kompilasi statistik, layanan dan promosi statistik, dan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi statistik. Dalam pelaksanaan kegiatan pokok tersebut dijabarkan menjadi komponen-komponen yang menjadi tanggung jawab masing-masing eselon III di lingkungan DDS dan ada beberapa yang dilaksanakan juga di BPS Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Komponen tersebut antara lain:

1. Peningkatan pelayanan metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus;
2. Peningkatan penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN);
3. Peningkatan kualitas dan layanan publikasi;
4. Pelayanan dan pengembangan informasi statistik;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan dokumentasi koleksi dan layanan data; dan
6. Peningkatan pelayanan.

Di sisi lain, kegiatan yang diampu oleh Direktorat SIS, yaitu menyediakan sistem layanan TI terintegrasi yang andal untuk penyelenggaraan kegiatan statistik nasional. Dalam pelaksanaan kegiatan pokok tersebut dijabarkan menjadi program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing eselon III di lingkungan Direktorat SIS. Program dan kegiatan tersebut meliputi:

1. Peningkatan jumlah koleksi data yang dipertukarkan dengan Kementerian/Lembaga lain;
2. Peningkatan Jumlah sistem atau layanan yang dikembangkan untuk mendukung *Digital Governance*;
3. Peningkatan kualitas dan layanan TI;

4. Peningkatan layanan jaringan komunikasi data;
5. Penambahan koleksi data sensus survei yang dihimpun;
6. Peningkatan keselarasan strategi bisnis dan TI;
7. Pengukuran manajemen dan risiko kinerja TI;
8. Penyediaan jumlah Dokumen Statcap Cerdas Bidang TI yang terbit tepat waktu;
9. Peningkatan jumlah inovasi TI yang mendukung Transformasi Digital;
10. Pengembangan TIK BPS untuk integrasi statistik dari hulu ke hilir;
11. Pengembangan sistem TI yang menerapkan standar pembangunan sistem;
12. Peningkatan hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS pusat tepat waktu;
13. Perbaikan sarana TI yang sesuai dengan *service level agreement*;
14. Pengadaan barang dan jasa TI yang akuntabel.

BAB IV



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2020-2024 bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik (MIS) 2020-2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Deputy Bidang MIS untuk tahun 2020–2024, Deputy Bidang MIS menetapkan 4 (empat) sasaran yang mencerminkan hasil (*outcome*) dari program Deputy Bidang MIS. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3 Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, 2020-2024

No	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Target					UIC
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.1	Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas						
	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	100	100	100	100	100	PMSS
1.2	Meningkatnya kualitas layanan TI dengan dukungan tata kelola TI, Sistem Terintegrasi dan Jaringan komunikasi yang andal						

	Indeks Kepuasan Layanan TI	75	80	90	95	98	SIS
2.1	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan K/L/D/I dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)						
	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik	NA	30	38	45	53	DDS
3.1	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional						
	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan	80	81	82	83	84	DDS

Sementara itu, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, Deputi Bidang MIS melalui Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) memiliki sasaran program dengan indikatornya sebagai berikut:

- 1.1. Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas, dengan indikator:
 Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas
- 1.2. Meningkatnya kualitas layanan TI dengan dukungan tata kelola TI, Sistem Terintegrasi dan Jaringan komunikasi yang andal, dengan indikator:
 Indeks Kepuasan Layanan TI
- 1.1. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan K/L/D/I dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN), dengan indikator:
 Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik
- 3.1. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional, dengan indikator:
 Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis di Deputi Bidang MIS. Proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis Deputi Bidang MIS tertuang dalam Dokumen Renstra Deputi Bidang MIS Tahun 2020–2024, harus didukung dengan pembiayaan yang cukup dan tepat guna, sehingga dapat mewujudkan pencapaian target kinerja secara efektif, efisien, serta akuntabel. Perkiraan kebutuhan biaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Deputi Bidang MIS selama lima tahun sejak tahun 2020 hingga 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Indikasi Kebutuhan Pendanaan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, 2020–2024

(Juta Rupiah)

Program/Kegiatan	Alokasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KEGIATAN 2897: Direktorat Diseminasi Statistik (Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik)	48.665	50.881	52.662	54.505	56.413
Kegiatan 2900: Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei)	13.691	14.745	15.431	16.133	16.852
Kegiatan 2901: Direktorat Sistem Informasi Statistik	1.940	2.008	2.078	2.151	2.227

Program/Kegiatan	Alokasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(Pengembangan Sistem Informasi Statistik					
Total	64.296	67.634	70.171	72.789	75.492

BAB V



BAB V PENUTUP

Seiring dengan perkembangan kebutuhan data statistik dan bertambahnya jenis data baru yang harus dikumpulkan, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik (MIS) senantiasa meningkatkan kualitas dan mengembangkan metodologi sensus dan survei dengan metode terkini untuk mendukung setiap produsen data dalam menghasilkan data sesuai prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Dengan demikian, ketersediaan data statistik berkualitas dapat terpenuhi. Peran diseminasi (penyebarluasan) statistik dalam penyediaan data baik bagi pemerintah maupun masyarakat menjadi penting baik dari aspek kualitas pendiseminasiannya maupun aspek kualitas pelayanan. Selain itu, infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mampu mendukung beban kerja pengumpulan data, pengolahan data, dan diseminasi statistik yang semakin meningkat mutlak diperlukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas.

Mengingat pentingnya peranan data dan informasi statistik dalam proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan nasional maupun bagi masyarakat, maka Deputi Bidang MIS menentukan strategi-strategi penguatan data dan informasi statistik yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis. Rencana Strategis Deputi Bidang MIS 2020–2024 merupakan wujud penuangan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Deputi Bidang MIS yang telah disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan BPS.

Adapun tujuan Deputi Bidang MIS 2020–2024, yaitu:

1. Tersedianya metodologi dan sistem yang andal dan terstandar untuk tersedianya statistik berkualitas;
2. Meningkatnya kolaborasi dengan K/L/D/I untuk metodologi dan pelaksanaan kegiatan statistik;

3. Meningkatnya kualitas layanan statistik dan layanan TI untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN);

Dalam Renstra Deputi Bidang MIS 2020–2024, setiap tujuan memiliki sasaran, indikator kinerja, arah kebijakan, serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Deputi Bidang MIS 2020–2024 membutuhkan komitmen yang tinggi. Komitmen ini dirumuskan sebagai antisipasi menghadapi tantangan global maupun regional pada periode lima tahun ke depan.

LAMPIRAN



Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik 2020-2024

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Kementerian/Lembaga: Badan Pusat Statistik								64.296,203	67.634,154	70.171,699	72.789,728	75.492,819	
	SS 1. Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Pusat											Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei
	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas		100	100	100	100	100						
	SS 2. Meningkatnya kualitas layanan TI dengan dukungan tata kelola TI, Sistem Terintegrasi dan Jaringan komunikasi yang andal	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten											Direktorat Sistem Informasi Statistik

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indeks Kepuasan Layanan TI		75	80	90	95	98							
	SS 3. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan K/L/D/I dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten												Direktorat Diseminasi Statistik
	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik		NA	30	38	45	53							
	SS 4. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten												Direktorat Diseminasi Statistik
	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan		80	81	82	83	84							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 2897: Direktorat Diseminasi Statistik (Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik)		Pusat						18.121,77	18.946,31	19.618,90	20.315,38	21.036,57	
	SS 1. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN							17.291,63	18.078,40	18.720,18	19.384,75	20.072,91	
	Persentase publikasi statistik yang memiliki ARC dan rilis tepat waktu		NA	100	100	100	100						
	Persentase layanan yang telah selesai diproses		NA	100	100	100	100						
	Persentase konsumen yang puas akan layanan statistik		80	81	82	84	86						
	SS 2. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN												
	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik sektoral		NA	30	35	40	45						
	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik		NA	30	38	45	53						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 2900: Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei)		Pusat						13.691,203	14.745,154	15.430,699	16.132,728	16.851,819	
	SS 1. Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas												
	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas		100	100	100	100	100						
	SS2. Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran												
	Persentase dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran		47	100	100	100	100						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	SS 3. Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data													
	Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data		4	4	6	3	2							
	SS 4. Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas													
	Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas		100	100	100	100	100							
	Persentase data SBR yang mutakhir dan berkualitas		-	-	-	100	100							
	Jumlah dokumen analisis geospasial dan peta tematik		-	-	3	3	3							
	Jumlah pengembangan dan pengelolaan sistem geospasial dan master frame		-	-	4	4	4							
	SS 5. Terwujudnya pembinaan dan/atau kerja sama dalam bidang metodologi sensus dan survei (baik dari aspek desain													

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan wilayah kerja statistik)												
	Persentase permintaan pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani (%)		75	100	100	100	100						
	Persentase permintaan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani (%)		75	100	100	100	100						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 2901: Direktorat Sistem Informasi Statistik Pengembangan Sistem Informasi Statistik)		Pusat						1.940	2.008	2.078	2.151	2.227	
	SS 1. Tersedianya platform data hub yang atraktif, kolaboratif dan terpercaya untuk mewujudkan Satu Data Indonesia												
	Jumlah koleksi data yang dipertukarkan dengan Kementrian/Lembaga lain*		2	2	4	4	4						
	Jumlah sistem atau layanan yang dikembangkan untuk mendukung <i>Digital Governance</i>		10	12	14	16	18						
	SS 2. Meningkatnya kualitas layanan TI dengan dukungan Tata Kelola TI, sistem terintegrasi dan jaringan komunikasi yang handal												
	Indeks Kepuasan layanan TI*		75	80	90	95	98						
	Persentase uptime layanan jaringan komunikasi data		99	99	99	99	99						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Jumlah penambahan koleksi data sensus survei yang dihimpun		20	20	20	20	20							
	Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS pusat tepat waktu		96	96	96	96	96							
	Persentase perbaikan sarana TI yang sesuai dengan <i>service level agreement</i>		100	100	100	100	100							
	Jumlah pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi		4	4	4	4	4							
	SS 3. Terwujudnya keselarasan Strategi TI dan Bisnis dalam kerangka transformasi digital													
	Persentase keselarasan strategi bisnis dan TI*		100	100	100	100	100							
	Persentase pengembangan TIK BPS untuk integrasi statistik dari hulu ke hilir*		75	75	80	80	80							
	<i>Performance & IT Risk Management Metrics</i>		2	2	2	2	2							
	Persentase sistem TI yang menerapkan standar pembangunan sistem		100	100	100	100	100							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Jumlah Dokumen Statcap Cerdas Bidang TI yang terbit tepat waktu		4	4	4	4	4							
	Jumlah inovasi TI yang mendukung Transformasi Digital		8	10	12	14	16							